



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## MENINJAU PERAN PENTING BADAN PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN (BP2K)

**Rohani Budi Prihatin**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[rohani.prihatin@dpr.go.id](mailto:rohani.prihatin@dpr.go.id)

**Dwiarti Simanjuntak**

Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id](mailto:dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Susunan kementerian dan kelembagaan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah ditetapkan. Secara proporsi dan komposisi, Kabinet Merah Putih saat ini merupakan kabinet tergemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi. Tidak hanya kementerian yang bertambah menjadi 48, jumlah badan pemerintah non-kementerian juga ikut bertambah. Salah satu di antara badan tersebut adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP2K). Menurut Presiden, urgensi pembentukan BP2K adalah untuk mempelajari dan melakukan *monitoring* terkait semua program perlindungan sosial. Selain itu, Badan ini nantinya tidak hanya menjalankan program penanggulangan seperti pembagian bantuan saja tetapi bertujuan lebih fundamental lagi yakni untuk pengentasan kemiskinan.

Sebagai perbandingan, India sebagai salah satu negara besar yang masih memiliki berbagai tantangan kemiskinan, juga memiliki badan pemerintahan non-kementerian yang bekerja untuk pengentasan kemiskinan seperti BP2K, yakni District Rural Development Agencies (DRDA). Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan di distrik-distrik yang dikelola oleh Kementerian Pembangunan Pedesaan (Ministry of Rural Development). Selain DRDA, India juga memiliki Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. Pembagian dan titik fokus kelembagaan menjadi krusial, mengingat kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh satu kelembagaan saja.

Berkaca dari pengalaman India tersebut, BP2K perlu dinaungi oleh Kementerian yang strategis dan sesuai dengan tujuan pengentasan kemiskinan agar dapat berjalan efektif. Langkah ini diperlukan sekaligus untuk memastikan pembagian peran dan fungsi dengan kementerian agar tidak saling tumpang tindih. Kekhawatiran ini tentu sangat beralasan mengingat pembentukan kabinet gemuk berpotensi menciptakan koordinasi antar kelembagaan yang rumit dan geraknya cenderung akan lamban. Padahal tujuan awal dibentuknya kementerian baru dan badan-badan khusus tersebut adalah untuk mempercepat jalannya berbagai program pengentasan kemiskinan. Jangan sampai harapan tersebut tidak tercapai karena adanya langkah-langkah kurang tepat.

Pemerintah Indonesia harus fokus terhadap tugas besar pengentasan kemiskinan. Dimana Indonesia meskipun pada Maret 2024 mengalami penurunan persentase tingkat kemiskinan yakni dari 9,36% pada Maret 2023 menjadi 9,03% pada Maret 2024, tetapi penurunan tersebut belum memenuhi target yang diharapkan. Sebagaimana diketahui, target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni sebesar 6,5-7,5%. Terlebih Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan di Indonesia turun ekstrem dari 0,5 hingga 6%. Untuk hal tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyatakan bahwa target terdekat dalam dua bulan, akan melakukan integrasi data kemiskinan bersama dengan BP2K. Sebab menurutnya, setelah adanya data yang valid dan tunggal barulah konsolidasi serta intervensi dari berbagai pihak dapat dijalankan.

Tak dapat dipungkiri dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan tidak mungkin dapat diselesaikan oleh satu kelembagaan melainkan butuh kolaborasi berbagai pihak. Bagaimanapun kemiskinan merupakan suatu persoalan besar yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan mulai dari sosial masyarakat, ekonomi, pendidikan, infrastruktur, pekerjaan, kesehatan dan sebagainya. Sejalan dengan hal tersebut, BP2K diharapkan segera menyusun perencanaan program pengentasan kemiskinan dengan mengkoordinasikan aktivitasnya dengan kementerian-kementerian teknis. Setidaknya ada 16 kementerian yang akan terkait, beberapa di antaranya seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, bahkan hingga Kementerian Kesehatan.

## Atensi DPR

Terkait pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP2K), Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan, dapat meminta penjelasan dari Kementerian Sosial dan BP2K mengenai langkah-langkah konkret dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, termasuk koordinasi antar-kementerian terutama dalam penggunaan data yang valid. Melalui rapat kerja dengan kementerian terkait, Komisi VIII DPR RI dapat memastikan agar kinerja kelembagaan yang terkait pengentasan kemiskinan tidak ada tumpang tindih. Dalam fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong penguatan regulasi terkait peran BP2K agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih efektif. Dalam fungsi anggaran, DPR RI perlu memastikan alokasi dana yang memadai untuk program-program BP2K serta memantau transparansi dan akuntabilitas anggaran untuk mencapai target pengurangan kemiskinan secara signifikan.

## Sumber

antaranews.com, 22 Oktober 2024;  
cnbcindonesia.com, 22 Oktober 2024;  
cnnindonesia.com, 22 Oktober 2024;  
detik.com, 23 Oktober 2024;  
kompas.com 22 dan 24 Oktober 2024;  
kontan.co, 22 dan 25 Oktober 2024;  
kumparan.com, 23 Oktober 2024;  
tempo.co, 24 Oktober 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyantri

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

